

Islam dan demokrasi: Prespektif Muhammad Husein Haikal

Amar Fatkhul Manan

Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: amaratkhul96@gmail.com

Kata Kunci:

Islam, demokrasi, asy-syuro', prinsip demokrasi

Keywords:

Islam, democracy, ash-syuro', the principles of democracy

ABSTRAK

Pada tahun 1970-an, peran Islam dalam politik global berubah secara signifikan. Kelompok Islam mulai muncul sebagai sumber inisiatif kemajuan dan perubahan politik, bukan hanya menjadi elemen reaktif dalam komunitas politik. Selama beberapa dekade terakhir abad ke-20, Organisasi Islam memainkan peran penting dalam kebangkitan Islam. Mereka mewakili organisasi sosial-politik alternatif yang dapat dipercaya dan menerima inisiatif dari pihak lain. Gerakan-gerakan ini mencerminkan aspirasi ganda dari kalangan profesional berpendidikan modern dan masyarakat Muslim yang menginginkan partisipasi lebih besar dalam proses politik dan terciptanya masyarakat yang lebih Islami. Oleh karena itu, organisasi baru ini berhasil menggabungkan dua tren utama pada akhir abad ke-20: kebangkitan demokrasi dan kebangkitan agama.

ABSTRACT

In the 1970s, the role of Islam in global politics changed significantly. Islamic groups began to emerge as an initiative source of political progress and change, rather than just being a reactive element in the political community. During the last decades of the 20th century, Islamic Organizations played an important role in the rise of Islam. They represented alternative socio-political organizations that could be trusted and accepted initiatives from others. These movements reflect the dual aspirations of modern educated professionals and Muslim communities who desire greater participation in the political process and the creation of a more Islamic society. In this way, The new organization therefore successfully combined two major trends of the late 20th century: the rise of democracy and the rise of religion.

Pendahuluan

Islam, sebagai agama dan pandangan dunia yang luas, memiliki implikasi yang beragam terhadap gagasan-gagasan politik, termasuk demokrasi. Pertama-tama, penting untuk diingat bahwa Islam bukanlah sistem politik yang tertentu, tetapi lebih merupakan kerangka nilai dan prinsip-prinsip moral yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk politik. Konsep utama dalam Islam seperti keadilan, kebebasan, dan akuntabilitas.(Ahmad et al., 2019) secara teoritis, dapat sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Namun demikian, terdapat beragam pandangan di kalangan cendekiawan Muslim tentang bagaimana demokrasi dapat diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks Islam. Beberapa berpendapat bahwa prinsip-prinsip demokrasi seperti pemerintahan oleh rakyat, kebebasan berpendapat, dan pemisahan kekuasaan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, yang lain mungkin menekankan pada pentingnya Islam sebagai panduan utama dalam mengatur kehidupan politik, yang dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda tentang bagaimana demokrasi harus dijalankan.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selain itu, terdapat isu-isu tertentu yang menjadi fokus perdebatan dalam hubungan antara Islam dan demokrasi, seperti perlindungan hak minoritas, peran agama dalam pembentukan hukum, dan hubungan antara agama dan kekuasaan politik.(Sukadi & Ningsih, 2021) Ketika mempertimbangkan hubungan antara Islam dan demokrasi, penting untuk mengakui bahwa ada keragaman dalam pandangan dan praktik di seluruh dunia Muslim. Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah berhasil menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi ke dalam sistem politik mereka, sementara yang lain masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan responsif. Dengan demikian, studi tentang Islam dan demokrasi melibatkan analisis yang cermat terhadap teks-teks keagamaan, sejarah politik, konteks sosial, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi dinamika politik di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan. Ini merupakan bidang yang menarik dan penting dalam studi politik dan agama kontemporer.

Kontribusi Pemikiran Politik M.Husain Haekal

Dia lahir di desa Kafr Ghanam, distrik Sinbillawain, Daqahlia, Mesir, pada 20 Agustus 1888. Setelah menyelesaikan pendidikan Quran di madrasah desanya, dia pindah ke Kairo untuk sekolah dasar dan menengah. Dia kemudian belajar hukum hingga mendapatkan lisensi pada tahun 1909. (Susfita, 2015) Selanjutnya, dia melanjutkan studinya di Fakultas Hukum Universite de Paris di Perancis, di mana dia mendapatkan gelar doktor dalam ekonomi dan politik pada tahun 1912. Dia kembali ke Mesir dan bekerja sebagai pengacara sebelum aktif dalam jurnalistik dan politik. Dia menjabat sebagai Menteri Negara dan Menteri Pendidikan sebelum menjadi ketua Majelis Senat dari awal tahun 1945 hingga 1950. Dia juga aktif dalam berbagai delegasi internasional dan penulis yang produktif. Dia meninggal pada 8 Desember 1956 setelah kembali menulis untuk harian-harian Al-Mishri dan Al-Akhbar sejak tahun 1953 (Subarkah, 2020), Kontribusinya antara lain :

A. Tentang Kenegaraan.

Menurutnya, kehidupan negara bagi umat Islam dimulai saat Nabi Muhammad hijrah dan menetap di Madinah, di mana dia mulai menetapkan ketentuan dasar berdasarkan wahyu Ilahi, seperti hukum waris, usaha, dan perdagangan. Wahyu yang diterima selama periode Mekah lebih menekankan pada keimanan kepada Tuhan dan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, ketentuan-ketentuan tentang kehidupan berkelompok, ekonomi, dan moral belum secara rinci menyentuh dasar-dasar pemerintahan. (Utomo, 2022) Meskipun dalam Al-Qur'an disebutkan untuk berkonsultasi dalam urusan bersama, itu tidak secara langsung terkait dengan sistem pemerintahan.

Haikal menyatakan bahwa meskipun empat Khalifah awal diangkat melalui musyawarah, bukan melalui pemilihan langsung, sehingga tidak bisa disamakan dengan sistem parlementer atau perwakilan. Pembaiatan oleh rakyat setelah konsultasi dengan tokoh masyarakat menempatkan khalifah lebih dekat dengan presiden daripada raja. Namun, dinasti-dinasti seperti Umayyah dan Abbasiyah mengadopsi bentuk kerajaan yang berbeda dengan semangat republic.(Susfita, 2015).

Adapun ada beberapa prinsip yang diletakkan Islam terhadap peradaban manusia, diantaranya (Ghozali, 2020) :

1. Prinsip Iman (percaya akan keesaan Allah (tauhid).
2. Pemahaman Islam sebagai peradaban manusia berarti meyakini bahwa alam semesta, termasuk kehidupan manusia, tunduk pada hukum-hukum Allah yang tetap dan tidak berubah. Haikal menegaskan bahwa pengelolaan masyarakat atau negara harus memperhatikan ciri-ciri manusia yang sesuai dengan fitrah alaminya, dan tidak memaksakan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia
3. Prinsip Persamaan. (Dalam hal orang-orang yang memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan, hak dan kewajiban yang sama, dan keduanya tunduk pada sunnah Allah Swt, kebebasan beragama dan pendapat harus tetap konsisten). Haikal mengklaim bahwa Islam tidak memiliki struktur pemerintahan yang konsisten. Selama sistem pemerintahan menjamin hak dan kewajiban yang sama bagi semua warga negara, termasuk di hadapan hukum, umat Islam memiliki kebebasan untuk memilih sistem pemerintahan apa pun. Musyawarah, atau syura, harus digunakan untuk mengelola urusan negara dengan mengikuti nilai-nilai moral dan etika yang mengajarkan Islam kepada manusia. Apalagi jika ada teori politik Barat yang masuk akal, dapat digunakan setelah penilaian yang mendalam.

B. Tentang Islam dan Demokrasi.

Islam, sebagai agama dan pandangan dunia yang luas, memiliki dampak yang beragam terhadap gagasan politik, termasuk demokrasi. Pertama-tama, penting untuk diingat bahwa Islam bukanlah sistem politik tertentu, melainkan kerangka nilai dan prinsip moral yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk politik.(Widiyaningrum, n.d.) Konsep-konsep utama dalam Islam seperti keadilan, kebebasan, dan akuntabilitas secara teoritis dapat sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, terdapat beragam pandangan di kalangan cendekiawan Muslim tentang bagaimana demokrasi dapat diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks Islam.(Susfiti, 2015) Beberapa cendekiawan berpendapat bahwa prinsip-prinsip demokrasi seperti pemerintahan oleh rakyat, kebebasan berpendapat, dan pemisahan kekuasaan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, yang lain menekankan pentingnya Islam sebagai panduan utama dalam mengatur kehidupan politik, yang dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda tentang bagaimana demokrasi harus dijalankan.

Sistem pemerintahan di berbagai negara demokrasi berbeda. Misalnya, Inggris menggunakan sistem parlementer, sedangkan Amerika Serikat menggunakan sistem federal, di mana Kongres memegang seluruh kekuasaan legislatif. Negara-negara ini memiliki dewan perwakilan yang dipilih secara jujur, membicarakan masalah secara bebas, dan mayoritas memutuskan. Semboyan Kebebasan, Persaudaraan, dan Kesetaraan dari Prancis adalah dasar dari sistem demokrasi yang mereka miliki sepanjang masa. (al-Zuhayli & Al-Kattani, 2010)

Meskipun kita berada di bawah pemerintahan Islam, kita harus kembali ke prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan untuk mendasarinya. Singkatnya, setiap sistem yang tidak bersandar pada demokrasi akan bertentangan dengan prinsip-prinsip utama Islam.

Kesimpulan

Dari pemaparan diatas dijelaskan bahwasanya Islam tidak menganut satu sistem pemerintahan yang tetap, tetapi memberikan kebebasan kepada umatnya untuk memilih sistem pemerintahan selama prinsip-prinsip Islam yang fundamental tetap terjaga. Haikal menekankan bahwa prinsip-prinsip seperti keadilan, kebebasan, dan akuntabilitas dalam Islam sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, suatu sistem pemerintahan harus menjamin kesetaraan hak dan kewajiban bagi semua warga negara, dan pengambilan keputusan harus dilakukan melalui musyawarah ('syura').

Haikal juga menegaskan bahwa sistem pemerintahan dalam Islam harus mencerminkan nilai-nilai kebebasan, persaudaraan, dan persamaan. Warna kulit, kebangsaan, dan bahasa tidak boleh menjadi alasan untuk diskriminasi, dan semua individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan Allah. Selain itu, kebebasan individu dalam Islam harus dihormati selama tidak merugikan atau mengganggu kebebasan orang lain.

Dalam konteks legislasi dan hukum, Haikal menekankan bahwa tidak ada seorang pun, meskipun memiliki kedudukan tinggi, yang berhak menetapkan keputusan secara otoriter. Keputusan harus diambil melalui lembaga perwakilan yang sah, dengan perdebatan yang bebas, dan berdasarkan prinsip suara mayoritas. Dengan demikian, Haikal melihat demokrasi sebagai sebuah sistem yang bisa harmonis dengan ajaran Islam, asalkan prinsip-prinsip dasar Islam diterapkan dan dihormati.

Daftar Pustaka

- Ahmad, A., Mahmood, Q. K., Saud, M., & Mas'udah, S. (2019). Women in Democracy: The political participation of women. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 32(2), 114. <https://doi.org/10.20473/mkp.V32I22019.114-122>
- al-Zuhayli, W., & Al-Kattani, A. H. (2010). *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Darul Fikir.
- Ghozali, M. (2020). KOSMOLOGI DALAM TAFSIR AL-IBRIZ KARYA BISRI MUSTAFA: RELASI TUHAN, ALAM DAN MANUSIA. *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(1), 112. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v19i1.3583>
- Sukadi, I., & Ningsih, M. R. (2021). *Islam and Democracy: Guarantee of the Right to Freedom of Opinion in the Principle of Religious Moderation*. International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020), Malang, East Java, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.017>
- Susfiti, N. (2015). Islam dan Demokrasi (Telaah Pemikiran Politik M. Husein Haikal). *Tasamuh*, 12(2), 149–158.
- Utomo, H. K. (2022). Genealogi Pemikiran Islam Liberal dan Pemikiran Soekarno: Nasionalisme, Demokrasi, dan Pluralisme. *Jurnal Communitarian*, 4(1). <https://doi.org/10.56985/jc.v4i1.232>
- Widiyaningrum, W. Y. (n.d.). PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK: SEBUAH KAJIAN TEORITIS. 4(2).